



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
TAHUN 2018**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN-RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviw Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing perangkat daerah.

Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung menyelaraskan dengan Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021 yang merupakan parameter pencapaian Kinerja Tahun . LKJip disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dan diharapkan dapat dipertanggung jawabkan melalui pencapaian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra), dan Perjanjian Kinerja (PK) melalui Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belumlah sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan dari pihak terkait agar Kinerja Dinas Yang dilaporkan menjadi lebih baik. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mangupura, 1 Pebruari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Badung,

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600304 198503 1.013.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Renstra 2016-2021.....	5
2.2 Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Realisasi anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur dihadapan Ida SangHyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa , Atas bimbingan dan tuntunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dapat selesai tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. dan dilaporkan kepada Bupati

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 Dari Visi dan Misi tersebut terbentuk Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. dan dituangkan dalam Renstra Untuk mencapai tujuan dan Sasaran sesuai Visi, Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung yang tertuang dalam Rencana Strategis dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung ada 17 (tujuh belas) berdasarkan 10 (sepuluh) sasaran, dari 3 (Tiga) Tujuan yang ingin dicapai tahun 2018 capaiannya dengan rincian sebagai berikut :

Selanjutnya pencapaian 10 sasaran mencakup 17 indikator kinerja diketahui memperoleh nilai rata-rata 107,44% dengan interpretasi memuaskan sedangkan serapan anggaran sebesar 68,06 %, hal ini dikarenakan faktor kebijakan eksternal, diluar kekuasaan dinas sehingga beberapa target sasaran yang rencana ditingkatkan belum bisa dilaksanakan tahun ini.

Sasaran 1, Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT , dengan 1 Indikator yaitu :Persentase Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan, dari target 75% realisasinya 100% yang bermakna sangat memuaskan.

Sasaran 2, Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan 2 (dua) indikator yaitu :
2.1.Jumlah aparatur yang berkompeten dalam manajemen Pemerintahan Desa. Dari target 46 desa realisasinya 46 desa yang bermakna memuaskan.

2.2.Jumlah desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dari target 19 Desa terealisasi 3 Desa, sedangkan lagi 16 (enam belas) desa belum bisa dilaksanakan karena faktor eksternal yang tidak bisa diputuskan pada Dinas PMD.

Sasaran 3, Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Desa dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

3.1.Persentase Kelembagaan Desa (BPD, LPM, PKK, dan BKAD) yang berperan aktif dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Dari target 85 % terealisasi 90 % yang bermakna sangat memuaskan.

3.2.Jumlah PKK yang aktif dengan target 606 TP PKK dan terealisasi 606 TP PKK, yang bermakna memuaskan.

3.3.Jumlah Posyandu yang aktif dengan target 547 posyandu dan terealisasi 547 posyandu, yang bermakna memuaskan.

Sasaran 4, Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dengan 2 (dua) indikator yaitu :

4.1.Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat. Dari target 65 % terealisasi 90 % yang bermakna sangat memuaskan.

4.2.Jumlah Desa Cepat Berkembang dan Berdaya. Dari target 16 Desa terealisasi 44 Desa yang bermakna sangat memuaskan.

Sasaran 5, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

5.1.Jumlah pasar desa yang aktif dan sehat. Dari target 33 pasar desa terealisasi 32 pasar desa.

5.2.Persentase kelompok TTG yang. Dari target 25% terealisasi 31% yang bermakna memuaskan.

5.3.Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif. Dari target 36 Bumdesa terealisasi 44 Bumdesa yang bermakna sangat memuaskan.

Sasaran 6, Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur, dengan 1 (satu) indikator yaitu :

6.1.Persentase tatakelola pelayanan administrasi. Dari target 100 % terealisasi 100 % yang bermakna memuaskan.

Sasaran 7, Berfungsinya barang milik daerah dengan baik, dengan 1(satu) indikator yaitu :

7.1.Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik. Dari target 100 % terealisasi 100 % yang bermakna memuaskan.

Sasaran 8, Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, dengan 1 (satu) indikator yaitu :

8.1.Persentase meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas. Dari target 100 % terealisasi 100 % yang bermakna memuaskan.

Sasaran 9, Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat, dengan 2 (dua) indikator yaitu :

9.1.Nilai akuntabilitas. Tahun 2018 target 76 ,belum ada nilai

9.2.Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu. Dari target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen yang bermakna memuaskan

Sasaran 10, Meningkatnya akses kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan dengan 1 Indikator Yaitu :

10.1 Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan Rastra Untuk tahun 2017 kegiatan ini dialihkan ke bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Badung, sehingga tidak dituangkan dalam PK Dinas PMD. Namun tahun 2018 kegiatan ini dikembalikan kepada Dinas PMD.dan secara fisik sudah terlaksana 100 % namun dengan adanya kebijakan pusat, kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja seluruh program dan kegiatan sebagaimana telah dianalisa pada Capaian Kinerja pada Bab III laporan Akuntabilitas , hampir seluruh program dan kegiatan dari masing-masing Indikator sasaran menunjukkan capaian kinerja yang baik sesuai target bahkan ada yang melampaui target, hal ini disebabkan karena komitmen Tinggi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan jajarannya untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bertitik tolak dari data yang dicapai,maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya di masa – masa akan datang.

Mangupura, 1 Pebruari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat
dan Desa Kabupaten Badung

Drs, Putu Gede Sridana, M,Si,
Pembina Utama Muda
NIP. 19600304 198503 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan sumberdaya lainnya selama kurun waktu setahun dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Pelaporan kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi serta alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Informasi capaian kinerja, keberhasilan dan identifikasi permasalahan untuk mengambil langkah terobosan yang inovatif dalam perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi kinerja yang semakin baik untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Dalam perspektip yang lebih luas LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagai salah satu Perangkat Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, walaupun tidak mendukung secara langsung IKU dalam RPJMD, namun Dinas PMD dalam menyusun Renstra menyelaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten yang kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai makna membangun manusia Indonesia seutuhnya, dimulai dari tingkat Pemerintahan terbawah dengan memperhatikan nilai kondisi mereka sebagai masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan jasmani dan rohani serta intelegensinya.

Pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan perlu terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan dan perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menuju desa swasembada. Kemampuan masyarakat desa untuk memproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana, daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana perekonomian termasuk lembaga perekonomian desa dan lembaga keuangan ditingkatkan agar mampu berperan dalam pengembangan ekonomi rakyat dan makin meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa khususnya dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, meningkatkan fungsi lembaga kemasyarakatan desa untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan; mengurangi kesenjangan masyarakat dalam pembangunan; serta mengatasi masalah kemiskinan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka terselenggaranya good governance yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban secara komprehensif dengan lebih menekankan pada peningkatan pelayanan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan lebih mendorong partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung menetapkan isu strategis :

1. Belum Optimalnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa
2. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Desa.
3. Rendahnya Penggunaan Data Base Desa.
4. Kurang Berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
5. Menurunnya Nilai – Nilai Sosial Masyarakat.
6. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Desa.
7. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta lingkungan hidup.

B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DPMD menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang . Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dinas menyelenggarakan Fungsi: :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
 - Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa
 - Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
- d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 - Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Perdesaan
- e. Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri dari:
 - Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - Seksi Keswadayaan Masyarakat, Kerjasama Antar Desa dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan
 - Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagai berikut :

Data Kepegawaian Menurut Pangkat/Golongan Ruang Per 1 Januari 2018

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina (IV/c)	1 orang
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang
3.	Pembina (IV/a)	8 orang
4.	Penata Tk. I (III/d)	11 orang
5.	Penata (III/c)	5 orang
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	6 orang
7.	Penata Muda (Iic)	18 orang
8.	Pengatur (II a)	2 orang
9.	Juru Tk. I (I d)	2 orang
	J u m l a h	54 orang

Tabel 2.3.

Data Kepegawaian Menurut Tingkat Pendidikan Per 1 Januari 2018

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	10 orang
2.	Sarjana	17 orang
5.	S M A	23 orang
6.	S M P	4 orang
	J u m l a h	54 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas yang diselaraskan dengan Sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Badung 2016-2021. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung masuk di Misi Ke-2 dengan Sasaran *Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik*; Misi ke-3 dengan Sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten*; dan *Misi ke-4 dengan Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan*.

Dan secara sistematis mengedepankan isu- isu strategis yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, ada Tiga (3) tujuan 10 (sepuluh) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Yaitu :

Tujuan yang ingin dicapai :

- 1 Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan Desa
2. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional
3. Menurunnya Angka Kemiskinan di Desa.

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah :

1. Meningkatkan pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Desa

4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kinerja Aparatur
5. Berfungsinya Barang Milik Daerah dengan Baik
6. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
8. Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Membangun Desa
9. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Ekonomi Desa
10. Meningkatnya akses kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Indikator Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung ada 17 yaitu :

1. Persentase Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam Pelayanan
2. Jumlah aparatur yang berkompeten dalam management Pemerintahan Desa
3. Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
4. Persentase Kelembagaan Desa (BPD, LPM, PKK, Lembaga Adat dan BKAD) yang berperan aktif dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa
5. Jumlah PKK yang aktif
6. Jumlah Posyandu yang aktif
7. Persentase tatakelola pelayanan administrasi
8. Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik
9. Persentase meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas
10. Nilai Akuntabilitas Kinerja
11. Jumlah Dokumen Perencanaan yang dikirim tepat waktu
12. Persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa
13. Jumlah Desa cepat berkembang dan berdaya saing
14. Jumlah Pasar Desa yang aktif dan sehat
15. Persentase kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang aktif
16. Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan aktif
17. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan Rastra

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresetansikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;sebagai dasar penilaian keberhasilan, kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment .

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan, sasaran dan target kinerja pada Rencana Strategis 2016-2021 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan telah ditetapkan pada tanggal Pebruari 2018

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	5
1.	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT	1. Persentase Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan	75%
2	Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Jumlah aparatur yang berkompeten dalam manajemen Pemerintahan Desa 2. Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	256 orang 19 Desa
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa	1. Persentase Kelembagaan Desa (BPD, LPM, PKK, Lembaga Adat dan BKAD)yang berperan aktif dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa 2. Jumlah PKK yang aktif 3. Jumlah Posyandu yang aktif	85% 606 TP PKK 547 posyandu

4	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa	1. Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat 2. Jumlah Desa cepat berkembang dan berdaya saing	65% 16 Desa
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi Desa	1. Jumlah Pasar Desa yang aktif dan sehat 2. Persentase kelompok TTG yang aktif 3. Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif	33 pasar desa 25 % 36 Bumdesa
6	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur	1. Persentase tatakelola pelayanan administrasi	100%
7.	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	1. Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100%
8	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1. Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang	100%
9	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai akuntabilitas kinerja 2. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu	76 3 dokumen
10	Meningkatnya akses kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat bantuan Rastra	100 %

C. PROGRAM DAN ANGGARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 melaksanakan 10 program prioritas dituangkan dalam 62 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.668.958.666,00 yang terdiri dari :

- 1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.750.052.777,00
- 2. Belanja Langsung : Rp. 21.918.905.889,00
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 1.201.342.000,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 20.085.063.889,00
 - c. Belanja Modal : Rp. 632.500.000,00

Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program prioritas dan program penunjang dibawah ini :

Tabel 2.2
Program dan Pagu anggaran
Tahun 2018

No	Program	Pagu anggaran
1	2	3
1.	Program Prioritas : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp.1.542.803.100,00
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 9.122.644.000,00
3	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rp. 2.281.103.100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.3.932.576.200,00
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp.2.630.158.060,00
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 26.944.700,00
7	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp.1.278.641.429,00
8	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	Rp.752.442.100,00

9	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.237.120.000,00
10	Program perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,00
	Total	Rp.21.918.905.889,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban atas target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja antara pimpinan instansi yang memberi mandat dengan pimpinan instansi dibawahnya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung tahun 2018 memuat tentang 2 (dua) hal yaitu: A. Capaian Kinerja organisasi; dan B. Akuntabilitas Keuangan.

Capaian Kinerja menguraikan tentang pengukuran kinerja organisasi dan analisis capaian kinerja, Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dengan realisasinya, .membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis . Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaporan akuntabilitas kinerja ini juga disajikan akuntabilitas keuangan yaitu realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2018

A. Capaian Kinerja

Tahun 2018 merupakan Tahun ke 2 (dua) pelaksanaan Rencana Strategis(RENSTRA) 2016 – 2021, sehingga Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung tahun 2018 yang disusun tahun 2019 menyajikan realisasi pelaksanaan Visi dan Misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran dan indikator yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, .

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 disesuaikan dengan dokumen perjanjian kinerja yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan, Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung bersama segenap jajarannya telah

berupaya mencapai 3 (tiga) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran dan 17 (Tujuh belas) indikator kinerja sasaran.

Adapun Capaian Kinerja, dan akuntabilitas keuangan dari masing-masing tujuan yang penjabarannya melalui alat ukur sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung tahun 2018 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1.Sasaran Pertama : Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT, berdasarkan Evaluasi terhadap 1 (satu) indikator sasaran yaitu: Persentase Desa yang menggunakan Aplikasi berbasis IT dalam pelayanan

Tabel 3.1
Analisis Capaian Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT	Persentase Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan	75%	100 %	133 %

Tahun 2018 indikator ini ditargetkan 75 % dengan capaian 100 % (133%). indikator kinerja ini ditargetkan mencapai 100 % di akhir periode RPJMD 2016-2021.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan termasuk pemerintahan desa menjadi kebutuhan dalam era saat ini untuk memberikan transparansi, efektifitas , efisiensi kenyamanan serta aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat, Sasaran meningkatnya pelayanan pemerintahan desa yang berbasis IT dimaksudkan Untuk percepatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan desa sehingga mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. untuk mempercepat terwujudnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Upaya untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui.Pembinaan kepada desa se kabupaten badung dalam pemakaian aplikasi berbasis web baik dalam penyusunan data profil desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa , maupun dalam pertanggungjawaban dan pelaporan

Adapun pencapaian sasaran ini adalah dalam :

- Penyusunan Profil Desa dan kelurahan (prodeskel) dalam rangka menyusun database pemerintahan desa yang lengkap dan akuntabel. Dari 46 (empat puluh enam) Desa yang ada, semua sudah menggunakan Sistem informasi (aplikasi) berbais web (online) dalam menyusun Profil Desa/Kel ; realisasi 100%
- Di Bidang pengelolaan keuangan desa agar transparan dan akuntabel maka dinas PMD mendorong dan memfasilitasi penggunaan (aplikasi) sistem keuangan desa (siskeudes).

- Dari 46 Desa yang ada semua sudah memakai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); realisasi 100%
- Dibidang pengelolaan aset desa, dari 46 desa yang difasilitasi untuk melaksanakan pengelolaan aset desa dengan memakai aplikasi sistem pengelolaan aset desa (sipades) yang dirancang oleh kemendagri , diharapkan Aset desa dapat terkelola dengan baik, sesuai ketentuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.,realisasi 100 %
 - Di bidang pertanggungjawaban, dan pelaporan dengan dibangunnya jaringan sistem informasi desa pada 46 desa yang ada, maka pengelolaan Keuangan Desa dengan sistem keuangan desa yang tadinya off line diharapkan sudah bisa online. Realisasi 100 % .

Selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran pertama ditahun 2018 dengan capaian tahun 2016 dan 2017 Dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran 1

Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	6	7	
1	Persentase Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan	55%	100%	100 %

Dari tabel 3.2 untuk Sasaran pertama dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2016 capaian kinerja sebesar 55% dari 2 aplikasi yang difasilitasi dari kemendagri yang diterapkan untuk desa yaitu penyusunan Profil desa dan sistem keuangan desa , belum semua desa mempergunakan aplikasi profil desa yang dikeluarkan kemendagri, capaiannya masih 55 %. Sedangkan tahun 2017 sudah semua desa menggunakan aplikasi sesuai yang diamanatkan kemendagri hal ini disebabkan karena Dinas PMD , dalam usahanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan konsen melakukan program dan kegiatan pembinaan secara berkelanjutan sehingga semua desa sudah menggunakan aplikasi dari kemendagri tersebut baik dalam sistem keuangan desa (penyusunan APBDesa) maupun penyusunan profil desa walaupun hasilnya blm maksimal, karena adanya kendala kuantitas dan kualitas SDM.

Sedangkan 2018 capaian 100 %, dimana semua desa sudah menggunakan aplikasi berbasis web yang dikeluarkan kemendagri dan hasilnya semakin meningkat, karena bagi desa yang tidak melaksanakan penyusunan profil desa dengan sungguh-sungguh tidak bisa menampilkan status tingkat perkembangan desa ada sangsi terhadap penetapan struktur organisasi desa. disamping itu untuk semakin meningkatkan pemakaian aplikasi berbasis web dalam pelayanan pemerintahan desa, dinas PMD juga memfasilitasi pemakaian sistem pengelolaan aset desa melalui aplikasi Sipades, dan pembangunan jaringan Sistem Informasi Desa (Sisdes) agar pertanggungjawaban/pelaporan keuangan bisa terlaksana secara online.

Pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Berdasarkan evaluasi terhadap 2 Indikator sasaran yaitu :

- 1. Jumlah aparatur desa yang berkompeten dalam manajemen Pemerintahan Desa
- 2. Jumlah desa yang melaksanakan pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi capaian kinerja tahun 2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Jumlah aparatur desa yang berkompeten dalam manajemen Pemerintahan Desa	46 Desa 256 org	46 desa 394 org	153 % 15,78 %
		2. Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	19	3	84,39%
		Rata-rata			

Tahun 2018 indikator 1 capaiannya (153%). indikator 2 target 19 desa realisasi 3 desa (15,78 %) % , rata-rata capaian 84,39 % sedangkankan target akhir tahun RPJM 2016-2021, tidak ada pemilihan perbikel.

Tuntutan terhadap penguatan kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan etika) sumber daya aparatur pemerintahan desa menjadi tantangan bagi organisasi pemerintahan desa yang

berorientasi pada pelayanan publik. Sasaran meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dievaluasi melalui 2 Indikator sasaran

Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator pencapaian sasaran ini adalah : Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Indikator 1 : jumlah aparatur desa yang berkompeten dalam manajemen pemerintahan desa . Hal ini diukur dari hasil kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi aparat pemerintahan desa di 46 desa,
- Bimtek sistem keuangan desa yang diikuti dari unsur kecamatan, bendahara dan kaur keuangan di 46 desa,
- Bimtek sistem pengelolaan aset desa diikuti oleh unsur kecamatan, Sekdes dan staf pengelola aset
- Evaluasi/verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa

(APB Desa) untuk 46 desa yang ditargetkan dapat terealisasi Indikator 2 : Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku Hal ini diukur dari kegiatan :

Pembinaan/monitoring Pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung. Untuk tahun 2018 derencanakan untuk 19 desa, namun hanya dapat terlaksana pada 3 desa. Capaian kinerjanya 33.3% hal ini disebabkan karena tertundanya penetapan 16 kelurahan menjadi desa, sehingga pemilihan perbekel tidak dapat dilaksanakan bagi 16 kelurahan tersebut. Sedangkan untuk 3 desa yang wajin melaksanakan pemilihan perbekel dapat terlaksana dengan lancar sampai dengan pelantikan ke 3 orang perbekel tersebut.

Selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran pertama ini ditahun 2018 dengan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.4

Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Jumlah aparatur yang berkompeten dalam manajemen Pemerintahan Desa	46 desa 102 orang	46 desa 285 orang	46 desa 394 Orang

2	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	3 Desa	1 Desa	3 desa
---	--	--------	--------	--------

Pada Sasaran dua yaitu Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa:

1. Pada tahun 2016 dilaksanakan Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa di 46 desa, dan bimtek sistem keuangan desa yang diikuti 102 orang, sedangkan tahun 2017 dilaksanakan Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di 46 desa, Bimtek sikeudes yang diikuti oleh pengelola keuangan di desa sebanyak 102 orang, dan bimtek bagi para ketua lingkungan (kaling) dilingkungan kelurahan yang dipersiapkan untuk menjadi desa diikuti 183 orang. Sedangkan di tahun 2018 jumlah aparat yang berkompeten meningkat karena dilaksanakan Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi aparat pemerintahan desa di 46 desa, Bimtek sistem keuangan desa yang diikuti unsur kecamatan, bendahara dan kaur keuangan di 46 desa,dan bimtek sistem pengelolaan aset desa diikuti oleh unsur kecamatan , sekdes dan staf pengelola aset
2. Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Pada tahun 2016, direncanakan 9 desa melaksanakan pemilihan dan pelantikan,realisasinya 9 desa. capaian kinerjanya 100 %
 Tahun 2017 direncanakan 3 (tiga) desa melakukan pemilihan Perbekel Antar Waktu (PAW), karena ada perbekel yg tidak bisa melaksanakan tugas, namun hanya 1 desa yang melaksanakan pemilihan perbekel hal ini disebabkan karena yang tersangkutbelum ada sangsi secara hukum sehingga belum bisa dilakukan penggantian perbekel, sedangkan yang perbekelnya meninggal, atas kesepakatan desa tidak melaksanakan PAW, tapi mengikuti pemilihan Perbekel secara serentak di tahun 2018. capaian kinerjanya hanya 33,3 % Untuk Tahun 2018 Pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung. derencanakan untuk 19 desa, namun hanya dapat terlaksana pada 3 desa. Capaian kinerjanya 33.3% hal ini disebabkan karena tertundanya penetapan 16 kelurahan menjadi desa, sehingga pemilihan perbekel tidak dapat dilaksanakan bagi 16 kelurahan tersebut. Sedangkan untuk 3 desa yang wajin melaksanakan pemilihan perbekel dapat terlaksana dengan lancar sampai dengan pelantikan ke 3 orang perbekel tersebut.

Hal ini dapat dicapai melalui usaha fasilitasi yang dilaksanakan Dinas PMD dalam hal penguatan kapasitas BPD, LPM, PKK dan BKAD melalui Pembinaan, pelatihan/Bimtek, Pendampingan peningkatan wawasan.

Melalui Fasilitasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi anggota BPD, LPM, PKK dan BKAD sebagai mitra Pemerintah Desa guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mampu bekerja secara profesional, memiliki motivasi dan spirit yang kuat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan yang baik bagi Desa/Kelurahan.

Capaian Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa dari hasil evaluasi terhadap 3 (tiga) Indikator) Yaitu :

Indikator 1 : Persentase kelembagaan Desa yang berperan aktif dalam pemerintahan dan Pembangunan Desa yang ditargetkan 85 % Realisasinya 92 % (105 %),

Hal ini diukur dari : Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui kegiatan:

- Pendampingan lembaga desa/ kemasyarakatan bagi BPD dan LPM se Kab badung, agar BPD dan LPM lebih memahami Tugas dan fungsinya, sehingga mampu mengoptimalkan perannya sebagai mitra desa/ kelurahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa/ kelurahan
- sosialisasi UU No 110 th 2016, dan sosialisasi dan musyawarah desa pembentukan BPD, BPD bereperan aktif dalam pengawasan perencanaan. Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa, sesuai tugas dan fungsinya
- Pelatihan TP PKK dan ketua-ketua kelompok PKK se Kabupaten badung sehingga mereka mampu berperan aktif dalam pemberdayaan keluarga/masyarakat desa, sesuai tugas fungsinya
- BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) berperan aktif sesuai fungsinya, namun dari 6 kecamatan yang ada baru 4 kecamatan terbentuk BKAD, sehingga kontribusi BKAD di Kabupaten Badung belum optimal.

Indikator 2 Jumlah PKK yang aktif

Hal ini diukur dari Jumlah PKK yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa sebanyak 606 PKK semuanya aktif realisasi 606 (100%).

Hal ini terlihat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan PKK selalu diikuti oleh semua kelompok PKK yang ada di kabupaten badung, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong dan memotivasi pemberdayaan pkk adalah :

- Pembinaan dan evaluasi 10 program pokok PKK pada 4 desa/kelurahan sudah terlaksana sesuai rencana;

- Pembinaan dan evaluasi dalam rangka lomba KG PKK KB/Kes Posyandu, PHBS Kabupaten Badung pada 6 kecamatan terealisasi sesuai rencana;
- Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung;
- Jambore kader PKK (mengikuti - Jambore PKK Tk. Provinsi dan Tk Nasional);
- Lomba - lomba PKK dalam rangka HUT Mangupura;
- Penyelenggaraan Tari Pendet Masal bagi 2

Indikator 3 Jumlah posyandu yang aktif

Target 547 posyandu capaiannya 547 aktif atau (100 %)

Demikian juga halnya dengan posyandu, semua posyandu yang dibentuk semua dalam keadaan aktif melaksanakan kegiatan rutin sesuai yang diharapkan

Untuk lebih meningkatkan Tata kelola dan pertanggungjawaban Pokjanal/pokja posyandu dilaksanakan melalui kegiatan :

- Pembinaan Pokjanal/Pokja Posyandu di 6 Kecamatan
- Bimtek, monitoring dan evaluasi sistem informasi posyandu.di 6 kecamatan

Tabel 3.6

Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa
Capaian kinerja Tahun 2016,2017 dan 2018

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	6	7	
1	Persentase Kelembagaan Desa (BPD, LPM dan BKAD) yang berperan aktif dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa	73%	92%	95 %
2	Jumlah PKK yang aktif	606 TP PKK	606 TP PKK	606 TP PKK
3	Jumlah Posyandu yang aktif	547 posyandu	547 posyandu	547posyandu

Pada Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa,

Berdasarkan hasil evaluasi 3 (tiga) indikator sasaran tersebut diatas kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu:

1. Persentase Kelembagaan Desa (BPD, LPM, PKK dan BKAD) yang berperan aktif dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Kita ukur dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 , capaian kinerja sebesar 73 % yaitu : dilaksanakan kegiatan Bimtek Sistem Informasi Manajemen PKK; diikuti 52 orang; Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat. Diikuti 170 orang anggota BPD, dan LPM, tahun ini belum semua anggota PKK,LPM dan BPD bisa mengikuti Bimtek baru mencapai 73 % ; Tahun 2017 capaian kinerja sebesar 92 % , tahun ini kembali dilaksanakan Bimtek untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi BPD dan LPM diikuti 108 (seratus delapan) orang dari Anggota BPD dan anggota LPM desa/ kelurahan.; Pelatihan TP PKK dan ketua-ketua klp PKK dari 74 orang, Sedangkan tahun 2018 selain dilaksanakan pendampingan bagi ketua dan anggota BPD dan LPM se Kabupaten Badung, sosialisasi UU no110 tahun 2016 demikian juga bagi ketua-ketua dan anggota PKK baik Kabupaten, Kecamatan maupun desa, dilaksanakan Pelatihan, dan pendampingan peningkatan wawasan bagi sehingga kapasitas dan kapabilitasnya meningkat
2. Jumlah PKK yang aktif
Pada tahun 2016 ; 2017 dan 2018 jumlah PKK yang aktif adalah 606 PKK dalam semua kelompok pkk di kabupaten badung dalam keadaan aktif
3. Jumlah Posyandu yang aktif
Demikian juga halnya dengan posyandu Tahun 2016, 2017 dan 2018 capaian kinerja sebesar 547 Posyandu yang aktif

Pada Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa

Berdasar hasil evaluasi terhadap 2 indikator yaitu :

Indikator 1 Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat

Indikator 2 Jumlah Desa Cepat Berkembang dan berdaya saing

Adapun capaian kinerja sasaran sebagai Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Membangun Desa sebagai tabel berikut :

Tabel 3.7

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa	1. Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	65%	236 %	363%
		2. Jumlah desa cepat berkembang dan mandiri	16 ds	40 ds	258 %
		Rata-rata			

Tahun 2018 indikator 1 Target 85 % ,realisasi 90 % capaiannya (105%). indikator 2 target 16 desa realisasi 40 desa capaian 258 % sedangkan target akhir tahun RPJM 2016-2021, untuk indikator 1 target 90 %, untuk indikator 2 sejumlah 34 desa

Adapun pencapaian sasaran ini diukur dari 2 Indikator Yaitu :

Indikator 1 : Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat

Swadaya murni masyarakat adalah partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat baik partisipasi perorangan maupun desa yang dikelola desa adat yang dinilai uangkan dalam rangka membangun desa, Capaian Indikator ini diukur dari Data perkembangan swadaya murni masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini dilaksanakan kegiatan :

- Pencanangan Bulan bakti gotong royong, dilaksanakan dengan tujuan memotivasi seluruh masyarakat desa/kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang dari Tk. Kabupaten,Provinsi dan tingkat nasional. Mencakup seluruh masyarakat Indonesia.
- Monitoring dan inventarisasi swadaya murni masyarakat, dilaksanakan kepada seluruh desa/kelurahan di kabupaten badung. Hasil dari kegiatan ini adalah data swadaya murni masyarakat baik di desa/kelurahan di Kabupaten Badung. Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Indikator 2 Jumlah Desa cepat berkembang dan Mandiri

Desa cepat berkembang adalah katagori desa hasil evaluasi perkembangan desa/kelurahan sesuai dengan permendagri 81 tahun 2015. Dari hasil pelaksanaan penilaian evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan secara mandiri oleh desa berdasarkan data profil desa. Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi perkembangan desa/ kelurahan dan penilaian evaluasi perkembangan desa (lomba desa)

Salah satu alat ukur untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan dilaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional. Evaluasi dan penilaian perkembangan desa meliputi tiga bidang yaitu perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan kewilayahan, dan perkembangan kemasyarakatan.yang terdiri dari 19 indikator penilaian.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah :

- pembinaan dan penyusunan profil desa /kelurahan Tingkat Kabupaten
- Pembinaan Perkembangan Desa bagi 4 desa wakil kecamatan
- Evaluasi perkembangan desa (lomba desa) bagi 4 desa wakil dari masing masing kecamatan

Selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran pertama ini ditahun 2017 dengan kegiatan pada tahun 2016

Tabel 3.8

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa
Perbandingan capaian indikator

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	50%	211 %	05,8 %
2	Jumlah Desa Cepat Berkembang dan berdaya saing	10 Desa	17 Desa	44 desa

Pada Sasaran keempat yaitu Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan target akhir periode RPJM 2016-2021 yaitu:

1. Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat
Tahun 2016 swadaya murni masyarakat sebesar Rp. 942.026.306.000 (50%) ; Tahun 2017 meningkat menjadi Rp.2.935.892.100.265 capaian kinerja sebesar 211%.hal ini disebabkan karena adanya tanah desa yang dipergunakan untuk fasilitas umum dengan harga yang tinggi. Tahun 2018 sebesar Rp. 722.155.563.917,00 jadi kenaikan (25%)
2. Jumlah Desa Cepat Berkembang dan berdaya saing.

Tahun 2016 jumlah desa cepat berkembang sebanyak 10 desa, meningkat menjadi 17 desa capaian kinerja 170 di tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat pesat menjadi 44 desa capaian kinerja 258 % sedangkan target capaian pada akhir RPJM 2016-2021 adalah sebesar 34 desa sudah tercapai pada tahun 2018.

Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pusat yang mewajibkan desa melaksanakan penilaian mandiri sesuai data profil yang lengkap dan akurat dan memberi sanksi kepada desa yang belum membuat evaluasi perkembangan desa secara mandiri melalui penetapan struktur organisasi pemerintahan desa.

Penilaian desa yang cepat berkembang dan berdaya saing/mandiri yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk lomba desa. Capaian kinerja yang dicapai oleh Kabupaten Badung dalam lomba desa sangat baik karena secara berturut-turut berhasil menjadi duta Provinsi Bali di tingkat Nasional dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Prestasi yang diraih dalam Lomba Desa/Lomba Evaluasi
Tingkat Perkembangan Desa
Tahun 2009 – 2018

Tahun	Kejuaraan Tingkat Kabupaten	Kejuaraan Tk Provinsi	Kejuaraan Tk Nasional
2009	Desa Pecatu	Juara I	Juara II
2010	Desa Gulingan	Juara I	
2011	Kelurahan Tanjung Benoa	Juara I	
2012	Kelurahan Sangeh	Juara I	
2013	Desa Ungasan	Juara I	
2014	Desa Dalung	Juara I	
2015	Desa Pecatu	Juara I	
2016	Desa Mengwi	Juara I	
2017	Desa Kutuh	Juara I	Juara I regional II
2018	Desa Cemagi	Juara 2	-

Pada Sasaran 5 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa
 Berdasarkan evaluasi terhadap 3 (tiga) indikator yaitu :

- Indikator 1 Jumlah pasar desa yang aktif dan sehat
- Indikator 2 Persentase kelompok TTG yang aktif
- Indikator 3 Jumlah Bumdesa yang aktif

Adapun capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Ekonomi Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa	1. Jumlah pasar desa yang aktif dan sehat	32 pasar	32 pasar	100%
		2. Persentase kelompok TTG yang aktif	25 %	31 %	124 %
		3. Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif	36 bumdesa	44	122 %
		Rata-rata			115,33

Tahun 2018 capaian kinerja dari 3 (tiga) Indikator sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Ekonomi Desa dapat dilihat bahwa : Untuk indikator 1 target 32 Pasar desa yang aktif realisasi 32 capaian 100 %; Indikator 2 target 25 % Kelompok TTG yang aktif realisasi 31 %; dan Indikator 3 Target 36 Bumdesa yang terbentuk dan aktif realisasi 44 Bumdesa capaian 122 %

Sumberdaya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan pemanfaatannya sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (lokal genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat, upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam masih memiliki keterbatasan pengelolaaannya,hal ini disebabkan sumber daya manusia masih memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan stimulasi dan transpormasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam,

potensi dan lingkungan hidup desa guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan melalui kebijakan pembinaan, Bimbingan Teknis, fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan promosi baik Tk. Kabupaten maupun nasional, kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 untuk mencapai indikator ini adalah :

- Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk Nasional untuk tahun 2018 Kab Badung menjadi tuan rumah;
- Pembinaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) pada 46 Desa;
- Pembinaan kelompok TTG untuk 6 kelompok TTG;
- Bimbingan Teknis bagi pengurus Bumdesa dan kelompok di 62 Desa/Kelurahan;
- Bimbingan Teknis Pengelolaan simpan pinjam untuk perempuan bagi 70 orang pengurus simpan pinjam untuk perempuan di Kabupaten Badung;
- Bimtek pengelolaan Pasar Desa bagi 64 orang pengelola pasar desa di Kabupaten Badung

Selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran pertama ini ditahun 2018 dengan kegiatan pada tahun sebelumnya

Tabel 3.11

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi Desa

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Jumlah Pasar Desa yang aktif dan sehat	18 Pasar Desa	32 Pasar Desa	32
2	Persentase kelompok TTG yang aktif	20%	20%	31%
3	Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif	30 Bumdesa	35 Bumdesa	44 Bumdesa

Pada Sasaran kelima yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi Desa, berdasarkan Evaluasi terhadap 3 (tiga) indikator sasaran yaitu:

1. Indikator 1 Jumlah Pasar desa yang aktif dan sehat.
Tahun 2016 capaian kinerjanya ada 18 Pasar Desa yang aktif dan sehat

Tahun 2017 capaian kinerjanya 32 Pasar Desa yang aktif dan sehat. Di tahun 2017 ada 6 (enam) Pasar Desa mendapat pembinaan guna meningkatkan tata kelola pasar desa sehingga mampu lestari serta mampu bersaing dengan pasar modern (Pasar Desa Penarungan, Pasar Desa Adat Legian, Pasar Desa Mengwitani, Pasar Desa Munggu, Pasar Desa Jagapati dan Pasar di Kelurahan Benoa);

2. Indikator 2 Persentase kelompok TTG yang aktif
- Tahun 2016 capaian kinerjanya 20 % dan Tahun 2017 capaian kinerja sebesar 20% dari 57 jumlah kelompok TTG sedangkan tahun 2018 dari target 25 % realisasi 31 %
3. Indikator 3 : Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif
- Tahun 2016 sudah 30 Bumdesa yang terbentuk dan realisasinya sudah 30 Bumdesa yang terbentuk, dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Pembinaan, workshop dan Bimtek Bumdesa, outcome/hasil yang diperoleh dari Bimtek ini terlatihnya dan terampilnya Aparat Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), dan termotivasinya pembentukan dan pengelolaan BUMDesa, sehingga meningkatnya pembentukan dan pengelolaan bimdesa untuk Tahun 2017 Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif sebanyak 35 Bumdes dan tahun 2018 mencapai 44 Bumdesa;

Pada Sasaran 6 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran dan kinerja aparatur dievaluasi dari 1(satu) Indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 yaitu Persentase tata kelola pelayanan administrasi
 realisasi capaian kinerjanya 100% sesuai dengan target
 Adapun hasil capaian kinerja untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kinerja Aparatur

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran dan kinerja aparatur	persentase tata kelola pelayanan administrasi	100%	100%	100%

Secara umum semua kegiatan dapat terlaksana sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia , capaian kinerja 100% Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Program

pelayanan administrasi perkantoran dengan 11 kegiatan : Pelayanan jasa administrasi keuangan. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Penyediaan ATK, Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan, penyediaan bahan bakar kendaraan, penyediaan alat komunikasi, penyediaan komponen listrik dan lainnya semua berjalan sesuai target yang ditetapkan. selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran pertama ini ditahun 2018 dengan kegiatan pada tahun sebelumnya

Tabel 3.13

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur				
No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun2018
1	Persentase tata kelola pelayanan administrasi	100%	100%	100%

Pada Sasaran keenam yaitu Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur, berdasarkan Evaluasi terhadap 1 (satu) indikator sasaran yaitu:

1 Persentase tata kelola pelayanan administrasi.

Tahun 2016 capaian kinerjanya 100% dan Tahun 2017 capaian kinerjanya 100% dilihat dari terlaksananya kegiatan penunjang tersebut diatas, sedangkan tahun 2018 pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada Sasaran 7 : Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

Indikator 1 yaitu Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :

- Pemeliharaan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan peralatan kantor
- Pemeliharaan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.

Adapun capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14

Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	1. Persentase barang milik daerah dipelihara dengan baik	100%	100%	100%

Selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran pertama ini ditahun 2018 dengan kegiatan pada tahun sebelumnya

Tabel 3.15

Perbandingan capaian Kinerja

Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	100%

Pada Sasaran ketujuh yaitu berfungsi barang milik daerah dengan baik, berdasarkan Evaluasi terhadap 1 (satu) indikator sasaran yaitu:

- 1 Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik.

Tahun 2016 capaian kinerjanya 100% dan Tahun 2017 capaian kinerjanya 100% yaitu adanya pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan perlengkapan kantor, dan pemeliharaan peralatan kantor, tahun 2018 semua pemeliharaan dapat terlaksana dengan baik

Pada Sasaran 8 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Indikator 1 Persentase meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas Realisasinya tercapai sesuai target yaitu 100%

Adapun capaian kinerja sasaran kedelapan adalah sebagai berikut

Tabel 3.16

Capaian Kinerja

Persentase Peningkatan Sarana Prasarana

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	1.Persentase Peningkatan Sarana Prasarana perkantoran	100%	100%	100%

Selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran pertama ini ditahun 2018 dengan kegiatan pada tahun sebelumnya

Tabel 3.17

Perbandingan capaian kinerja

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Persentase meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas	100%	100%	100%

Pada Sasaran kedelapan yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, berdasarkan Evaluasi terhadap 1 (satu) indikator sasaran yaitu:

- 1 Persentase meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas.

Tahun 2016 capaian kinerjanya 100% dan Tahun 2017 capaian kinerjanya 100%, yaitu pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis : (Papan struktur, papan penunjuk ruangan, sekat kontrol sound ruang rapat, Banner). Semuanya sudah terealisasi. 100% sedangkan tahun 2018 semua pengadaan secara fisik dapat terlaksana sesuai target, sedangkan realisasi keuangan terjadi efisiensi harga.

Pada Sasaran 9 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator 1 Nilai akuntabilitas kinerja untuk tahun 2018 Belum ada nilai.

Indikator 2 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu Realisasinya tercapai sesuai target yaitu 3 dokumen

Tabel 3.18

Capaian Kinerja

Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja aparatur

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja aparatur	1. Nilai akuntabilitas Kinerja	76	-	-
		2. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu	3 dok	3 dok	100%

Selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran kesembilan dengan tahun 2018 dengan kegiatan pada tahun sebelumnya

Tabel 3.19

Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Perbandingan capaian Kinerja

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Nilai akuntabilitas kinerja	74	79,60	Belum ada
2	Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen

Pada Sasaran kesembilan yaitu Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berdasarkan Evaluasi terhadap 2 (dua) indikator sasaran yaitu:

1 Nilai akuntabilitas kinerja.

Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 74

Tahun 2017 naik menjadi 79,60 sedangkan tahun 2018 belum ada penilaian.

2. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu.

Tahun 2016, 3 (tiga) Dokumen (Renstra, Renja, RKA) telah dapat diselesaikan dan dikirim tepat waktu.

Tahun 2017, 3 (tiga) Dokumen (Renstra, Renja, RKA) telah dapat diselesaikan dan dikirim tepat waktu. Untuk tahun 2018 semua dokumen perencanaan dapat terealisasi sesuai target.

Sasaran Kesepuluh : Meningkatnya Akses kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

berdasarkan Evaluasi terhadap 1 (satu) indikator sasaran yaitu: Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan Rastra

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Meningkatnya Akses Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Akses Kesejahteraan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapat bantuan Rastra	100%	100 %	100 %

Tahun 2018 indikator ini ditargetkan 100 % dengan capaian 100 % (100%). indikator kinerja ini ditargetkan mencapai 100 % di akhir periode RPJMD 2016-2021.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah dalam :

- Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Rastra di Kabupaten Badung Realisasi 100 % .

Selanjutnya kita membandingkan capaian kinerja sasaran pertama ditahun 2018 dengan capaian tahun sebelumnya Dapat dilihat pada

Tabel 3.21
Perbandingan capaian kinerja
Meningkatnya Akses Kesejahteraan sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan siosial

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	6	7	
1	Persentase Keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan Rastra	100 %	-	100 %

Dari tabel 3.2 untuk Sasaran pertama dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2016 capaian kinerja sebesar 55% dari 2 aplikasi yang difasilitasi dari kemendagri yang diterapkan untuk desa yaitu penyusunan Profil desa dan sistem keuangan desa , belum semua desa mempergunakan aplikasi profil desa yang dikeluarkan kemendagri, capaiannya masih 55 %. Sedangkan tahun 2017 sudah semua desa menggunakan aplikasi sesuai yang diamanatkan kemendagri hal ini disebabkan karena Dinas PMD , dalam usahanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan konsen melakukan program dan kegiatan pembinaan secara berkelanjutan sehingga semua desa sudah menggunakan aplikasi dari kemendagri tersebut baik dalam sistem keuangan desa (penyusunan APBDesa) maupun penyusunan profil desa walaupun hasilnya blm maksimal, karena adanya kendala kuantitas dan kualitas SDM.

Sedangkan 2018 capaian 100 %, dimana semua desa sudah menggunakan aplikasi berbasis web yang dikeluarkan kemendagri dan hasilnya semakin meningkat, karena bagi desa yang tidak melaksanakan penyusunan profil desa dengan sungguh-sungguh tidak bisa menampilkan status tingkat perkembangan desa ada sangsi terhadap penetapan struktur organisasi desa. disamping itu untuk semakin meningkatkan pemakaian aplikasi berbasis web dalam pelayanan pemerintahan desa, dinas PMD juga memfasilitasi pemakaian sistem pengelolaan aset desa melalui aplikasi sipades, dan pembangunan jaringan sistem informasi desa (sisdes) agar pertanggungjawaban/pelaporan keuangan bisa terlaksana secara online.

B Realisasi Anggaran Tahun 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2018 memiliki 10 (sepuluh) Program dan di dukung oleh 62 (Enam puluh dua) kegiatan. Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.668.958.666,00 terealisasi Rp.22.917.378.246,00 sebesar 68,06 % terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Pagu Rp.11.750.052.777,00 realisasi Rp.9.514.482.047,00 persentase 80,97 %
2. Belanja Langsung :
 - 2.1 Belanja Pegawai Pagu Rp. 1.201.342.001 realisasi Rp. 909.429.000 persentase 75,70 %
 - 2.2 Belanja Barang/Jasa Pagu Rp. 20.085.063.888 realisasi Rp.11.903.889.199 persentase 59,27 %
 - 2.3 Belanja Modal Pagu Rp. 632.500.000 realisasi Rp. 589.578.000 persentase 93,21 %

Catatan atas pencapaian Kinerja Keuangan :

1. Untuk belanja tidak langsung capaian sebesar 80,97 %, hal ini disebabkan karena adanya biaya cadangan sebesar %, hal kedua karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi keluar. Secara kebutuhan belanja tidak langsung terpenuhi 100 %
2. Untuk Belanja Langsung :
 - 2.1. Belanja pegawai capaian kinerja keuangan sebesar 75,70 % hal ini disebabkan adanya efisiensi terhadap pembayaran Narasumber pada pelatihan/ Bimtek/ Pembinaan
 - 2.2. Belanja Barang/ Jasa capaian kinerja keuangan capaiannya sebesar 59,27 %, hal ini disebabkan karena ada penundaan pembayaran terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, adanya efisiensi harga untuk beberapa rekening, efisiensi kebutuhan atau diamprah hanya sesuai kebutuhan; dan ada beberapa rekening tidak bisa dilaksanakan karena faktor luar yaitu tertundanya penetapan kelurahan menjadi desa.
 - 2.3. Untuk Belanja Modal capaian kinerja keuangan sebesar 93,21 %, hal ini karena efisiensi harga.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan saktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2018 yang disusun berdasarkan nilai capaian kinerja pada masing-masing Sasaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dapat disimpulkan sebagai berikut

Sasaran 1, Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT , dengan 1 Indikator yaitu :

Persentase Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan, dari target 75% realisasinya 100% yang bermakna sangat memuaskan.

Sasaran 2, Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan 2 (dua) indikator yaitu :

2.1.Jumlah aparatur yang berkompeten dalam manajemen Pemerintahan Desa. Dari target 46 desa orang realisasinya 46 desa yang bermakna memuaskan.

2.2.Jumlah desa yang melaksanakan Pilkel Antar Waktu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dari target 9 Desa terealisasi 3 Desa, sedangkan lagi 16 (enam belas) desa belum bisa dilaksanakan karena faktor eksternal yang tidak bisa diputuskan pada Dinas PMD.

Sasaran 3, Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Desa dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

3.1.Persentase Kelembagaan Desa (BPD, LPM, PKK, dan BKAD) yang berperan aktif dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Dari target 85 % terealisasi 90 % yang bermakna sangat memuaskan.

3.2.Jumlah PKK yang aktif dengan target 606 TP PKK dan terealisasi 606 TP PKK, yang bermakna memuaskan.

3.3.Jumlah Posyandu yang aktif dengan target 547 posyandu dan terealisasi 547 posyandu, yang bermakna memuaskan.

Sasaran 4, Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dengan 2 (dua) indikator yaitu :

4.1.Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat. Dari target 85 % terealisasi 90 % yang bermakna sangat memuaskan.

4.2.Jumlah Desa Cepat Berkembang dan Berdaya. Dari target 16 Desa terealisasi 44 Desa yang bermakna sangat memuaskan.

Sasaran 5, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

5.1.Jumlah pasar desa yang aktif dan sehat. Dari target 32 pasar desa terealisasi 32 pasar desa yang bermakna memuaskan.

5.2.Persentase kelompok TTG yang. Dari target 25% terealisasi 31% yang bermakna memuaskan.

5.3.Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif. Dari target 36 Bumdesa terealisasi 44 Bumdesa yang bermakna sangat memuaskan

Sasaran 6, Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur, dengan 1 (satu) indikator yaitu :

6.1.Persentase tatakelola pelayanan administrasi. Dari target 100 % terealisasi 100 % yang bermakna memuaskan.

Sasaran 7, Berfungsinya barang milik daerah dengan baik, dengan 1(satu) indikator yaitu :

7.1.Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik. Dari target 100 % terealisasi 100 % yang bermakna memuaskan.

Sasaran 8, Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, dengan 1 (satu) indikator yaitu :

8.1.Persentase meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas. Dari target 100 % terealisasi 100 % yang bermakna memuaskan.

Sasaran 9, Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat, dengan 2 (dua) indikator yaitu :

9.1.Nilai akuntabilitas. Tahun 2018 target 76 ,belum ada nilai

9.2.Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu. Dari target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen yang bermakna memuaskan

Sasaran 10, Meningkatnya akses kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan dengan 1 Indikator Yaitu :

10.1 Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan Raster Untuk tahun 2017 kegiatan ini dialihkan ke bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda

Kabupaten Badung, sehingga tidak dituangkan dalam PK Dinas PMD. Namun tahun 2018 kegiatan ini dikembalikan kepada Dinas PMD. dan secara fisik sudah terlaksana 100 % namun dengan adanya kebijakan pusat, kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh dinas sosial, sehingga pada bulan agustus secara resmi kegiatan ini dilanjutkan oleh Dinas Sosial.

Dari capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMD sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai apa yang direncanakan walaupun masih belum optimal. Dari 10 sasaran dengan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD sudah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan berkomitmen untuk tetap memperbaiki sistem pertanggungjawaban melalui dokumen SAKIP. Hal ini dapat dilihat dari upaya memperbaiki dokumen SAKIP melalui revisi RPJMD, Renstra, RKT., PK dan dokumen lainnya agar selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan .

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.33.668.958.666,00 terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp, 11.750.052.777,00 terealisasi sebesar 80,97 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 21.918.905.889.00 terealisasi sebesar 61,15 %. Secara keseluruhan anggaran Terealisasi sebesar Rp. 22.917.378.246,00 sebesar 68,06 % namun secara fisik realisasi kegiatan mencapai 100%.

Realisasi keuangan tidak mencapai 100 % disebabkan karena

- Pada belanja tidak langsung terdapat sisa anggaran sebesar 19,03 % Hal ini disebabkan karena ada mutasi staf keluar dan ada pegawai yang pensiun.
- Pada Belanja Langsung terdapat sisa anggaran sebesar 31,94 % hal ini disebabkan karena pada belanja modal dan beberapa belanja barang /jasa ada efisiensi harga, beberapa belanja disesuaikan dengan kebutuhan, efisiensi terhadap belanja narasumber, adanya penundaan pembayaran (pengakuan hutang), serta adanya beberapa rekening yang tidak diamprah karena kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya faktor eksternal diluar kemampuan dinas.

Walaupun secara keseluruhan Indikator telah mencapai target bahkan beberapa indikator melebihi target, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih. Berubahnya pengaturan tentang Desa yang secara signifikan berpengaruh terhadap implementasi tata kelola pemerintahan di desa, memerlukan pendampingan yang signifikan sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung belum didukung dengan sarana dan prasarana khususnya sumber daya manusia (aparatur) dengan kompetensi yang memadai.

Disamping itu, semakin besarnya sumber daya dan sumber dana ke Desa berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan di desa. Hal tersebut sangat berkaitan dengan tugas dan

fungsi yang harus dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, khususnya memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung, melakukan pembinaan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan lebih mendorong partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

B. SARAN

Dengan Laporan Kinerja ini maka dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung. Akan tetapi untuk kelanjutan pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung perlu dukungan dan komitmen pimpinan baik dalam hal kebijakan maupun sarana dan prasarana khususnya penambahan SDM yang berkompeten, serta dukungan dari semua instansi terkait.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19600304 198503 1 013.